

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN IRIGASI DI DESA SULI INDAH KECAMATAN BALINGGI KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Fachrul Reza

fachrulreza28@yahoo.com

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

The purpose of this study was to determine the Development Policy Implementation Irrigation Systems in Suli Indah subdistrict Balinggi Moutong Parigi district, in this case the Technical Implementation Unit of the Department of Agriculture and Animal Husbandry Kecamatan Balinggi. The theory that is in use is the theory of Edward III, the factors being addressed: Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure. With qualitative research methods. Informants in this study is the Head of the Executive Unit Technical Department of Agriculture and Peternakn District of Balinggi, Head of Agricultural Extension District of Balinggi, Agricultural Extension Workers, fostering farmer in the village of Suli Indah, 2 People Farmers in Suli Indah, Chairman of the Water User Farmers Suli Indah , Community Leaders In Suli Indah targeted research. Data collection techniques used are obserfasi, interviews and documentation. The results showed that the implementation of development policies Irrigation Systems In Suli Indah subdistrict Balinggi Moutong Parigi district has been running well, however they must be repaired communication because not maximized. In view of the factors Resources, Disposition, Bureaucratic Structure, communication factor in view less because there are still farmers who do not know about this program does not come in because many times in meetings, and dissemination of which is held by the sub-district agricultural office Balinggi.

Keywords: *Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure.*

Pada umumnya pengembangan sistem irigasi di desa Suli Indah sudah beberapakali mendapat bantuan pengembangan sistem jaringan irigasi sejak tahun 2009 sampai di tahun 2015 namun melalui beberapa seleksi serta jatah per kecamatan di daerah pariggi mautong sehingga pengembangan sistem jaringan irigasi di Kecamatan Balinggi melalui seleksi dalam bentuk proposal pengajuan kelompok tani pemakai air yang di tentukan oleh KUPTD pertanian di kecamatan Balinggi dalam kelayakannya menerima bantuan dalam bentuk rehap ataupun pembuatan saluran jaringan irigasi permanen.

Jumlah kelompok tani pemakai air yang ada di Kecamatan Balinggi 49 kelompok sedangkan kelompok yang belum mendapatkan jatah perbaikan maupun pembuatan jaringan irigasi adalah sekitar 19 bkelompok.

Faktanya saat ini, pelaksanaan pengembangan sistem jaringan irigasi di beberapa tempat tidak berjalan sebagaimana mestinya yang menjadi alas implementasinya, yakni tertib administrasi, administratif, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan. Sejak program pemerintah ini di terapkan dalam bentuk bantuan sosial selalu mengalami kendala dimana bantuan yang turun tidak sepenuhnya terealisasi atau terpenuhi, serta beberapa kelompok tani yang blum mndapat bantuan akibat penjatahan atau dengan kata lain pembagian dengan kelompok tani pemakai air yang lain yang juga membutuhkan, para petani masih bnyak yang mngeluh dikarnakan debit air yang tdk merata yang masuk ke areal sawa mereka, partisipasi masyarakat juga dalam upaya pngembangan sistem irigasi ini juga cendrung merugikan, dimana tidak merawat atau menjaga irigasi yang sudah ada dari

sampah serta membuang limbah pada saluran irigasi. Selain itu belum maksimalnya komunikasi yang di jalankan oleh dinas pertanian kecamatan balinggi mengenai sosialisasi kepada petani tentang bantuan pengembangan sistem jaringan irigasi dimana kenyataannya di lapangan masih banyak petani yang tidak mengetahui dengan jelas dan mendalam bagaimana proses pengajuan bantuan jaringan irigasi ini sehingga dapat terelisasi dimana terbukti dengan masih banyaknya jaringan irigasi yang belum di perhatikan oleh pemerintah karena masih banyaknya jaringan irigasi yang rusak dan masih beralas kan tanah. Sedangkan pada aspek sumberdaya masih bnyak pengurus kelompok yang mendapat bantuan dana pengembangan sistem jaringan irigasi yang tidak paham akan pengelolaan keuangan serta staf Pembina dari pegawai pertanian yang tidak maksimal dalam pembinaan kelompok tani dikarenakan tiap desa hanya di bina oleh satu penyuluh pertanian lapangan sehingga kelompok-kelompok tani yang mendapat bantuan tidak mendapat pemahaman yang maksimal mengenai penyusunan keuangan. Kemudian di lihat dari aspek disposisi UPTD pertanian belum memaksimalkan petunjuk teknis sehingga masih adanya penyalahgunaan dana oleh kelompok tani hal ini sangat berkaitan dengan SDM yang kurang dimana UPTD hanya di bantu oleh badan penyuluh pertanian yang menugaskan penyuluh pertanian yang sedikit yang hanya 1 orang untuk membina satu desa, namun masalah lain yang ada di lapangan adalah tidak komitmnya petani terhadap petunjuk teknis yang harus di kerjakan oleh petani mengenai penggunaan dana dan standar pengerjaan jaringan irigasi serta masalah lain yang ada di lapangan adalah tidak jujurnya petani mengenai penggunaan dana tersebut dimana adanya penyelewengan dana yang di pergunakan bukan untuk penggunaan pengembangan jaringan irigasi. dan dari aspek struktur birokrasi pembuatan laporan

keuangan yang masih acak-acakan oleh kelompok tani fakta yang ada di lapangan sulit untuk menerapkan petunjuk teknis terhadap petani di karenakan mereka hanya bisa mengurus persawahan dan bukan orang yang berlatar belakang tinggi bahkan sangat kurang paham akan administrasi dan UPTD sendiri kualahan untuk member pemahaman mulai dari proses pengajuan permohonan bantuan sampai dengan pembuatan laporan keuangan hasil pengembangan sistem pengembangan sistem irigasi.

Permasalahan inilah yang menjadi isu yang berkembang terkait implementasi kebijakan Pengembangan Sistem Irigasi dimana penerapannya tidak begitu baik, karna kordinasi yang dilakukan UPTD Pertanian Kecamatan Balinggi dengan kelompok-kelompok tani pemakai air yang ada di Desa Suli Indah kurang baik sehingga implementasi kebijakan Pengembangan sistem irigasi kurang maksimal, dan bahkan pernah di respon oleh pemerintah provinsi dengan evaluasi ke sejumlah desa dan kelompok tani di kecamatan balinggi yang menerima bantuan tersebut. Menariknya, meski hasil evaluasi tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dari mestinya, program ini berjalan terus seolah-olah tdk adanya permasalahan dalam implementasinya, terkesan adanya pembiaran berlangsungnya inkonsistensi kebijakan, bahkan dalam bahasa yang mudah di pahami bias di katakana pelanggaran penerapan kebijakan yang di biarkan.

Fakta yang menunjukkan proses pengembangan sistem irigasi jauh dari kondisi ideal yang di diharapkan, terkaid implementasi Pengembangan Sistem Irigasi di desa Balinggi tersebut menarik untuk di kaji lebih dalam sesuai prosedur ilmiah. Karna itu, proposal ini di ajukan dengan judul, Implementasi Kebijakan Pengembangan Sistem Irigasi Di Desa Suli Indah Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Mautong.

METODE

Seluruh rangkaian penelitian yang dilaksanakan menggunakan prinsip metodologi kualitatif, yakni suatu metode penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiono, 2005: 7). Hasil penelitian kualitatif lebih memungkinkan diperolehnya data diskriptif berupa data lisan dari informan dan perilaku sosial yang dapat diinterpretasikan dan diformulasikan secara sistematis, factual, objektif, dan alamiah. Bogdan dan Tailor (Moleong, 2005 : 3) menegaskan bahwa, “prosedur penelitian yang menghasilkan bahwa, “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati di sebut pula metodologi kualitatif”.

Penelitian Deskriptif atau yang di sebut juga penelitian taksonomik (*taxonomic research*) bermaksud mengeksplorasi dan klarifikasi suatu fenomena atau kenyataan social, yakni dengan mendeskripsikan variable yang berkaitan dengan masalah yang di teliti, tanpa harus mempersoalkan jalinan antara variable. (lihat Sanapiah Faisal. 1989 : 20-27). Dalam kalimat lain, penelitian kualitatif diskriptif menggunakan pendekatan induktif dalam menafsirkan data yang di peroleh langsung di lapangan (*grounded research*). Apabila sejak awal tidak di tetapkan kerangka teori, konsruk konsep dan variabel, serta relasi antar dimensi atau variabel, maka pendekatan induktif pada studi sejenis ini justru dimaksudkan untuk memformulasikan variabel, konsep, serta relasi antar konsep dan variabel secara induktif.

Penelitian ini akan di laksanakan selama 3 (tiga) bulan, mulai terhitung sejak

proposal ini diterima dan mendapatkan surat izin penelitian hingga selesai. Yaitu di mulai dari Bulan Oktober sampai dengan Bulan Januari.

Definisi informan menurut Moleong (2006:132) adalah orang yang dapat informasi tentang situasi dan kondisi dari latar penelitian , menurutnya informan akan memberi pandangan dari segi orang tentang nilai, sikap, proses dan kebudayaan yang menjadi latar dari lingkungan penelitian yang akan di lakukan. Dasar dari pemilihan informan adalah individu-individu yang mengetahui dan memahami tentang pengembangan sistem jaringan irigasi

Informan dalam penelitian ini merupakan orang yang di pandang mengetahui dan memahami tentang komunikasi, SDM, disposisi dan struktur birokrasi dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi dalam hal ini para pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Balinggi 1org Kepala Badan Penyuluh Peertanian 1org Penyuluh pertanian lapangan (PPL) Yang membina GP3A 1org Petani di kecamatan Balinggi 2org Ketua P3A (petani pemakai air) Desa Suli Indah 1org Toko masyarakat 1 orang jadi total keseluruhan informan adalah 7 orang.

Implementasi kebijakan Pengembangan Sistem Irigasi yaitu suatu tindakan dalam pelaksanaan keputusan atau undang-undang (33 ayat 3 UU 1945, UU Sumber Daya Air, (PP) No. 20 Tahun 2006 , Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi) yang di tetapkan oleh pengambil kebijakan untuk dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang ada di lapangan, khususnya dalam hal ini adalah pengembangan sistem irigasi. Yang kemudian di ukur menggunakan konsep George Edward III , 1980, (Dalam joko widodo 2006 : 96-106)

a. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi yang akurat dari

Kepala unit pelaksana teknis dinas pertanian (KUPTD), Petugas teknis, Petugas Penyuluh lapangan (PPL), kepada petani pemakai air mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan implementasi atau proses pengembangan sistem irigasi di Desa Suli Indah Kecamatan Balinggi.

- b. Sumber Daya adalah potensi yang dimiliki oleh UPTD pertanian Kecamatan Balinggi meliputi jumlah pegawai petugas teknis, Petugas penyuluh lapangan (PPL), yang ahli di bidangnya yang dapat memberikan informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dalam upaya-upaya pengembangan sistem irigasi serta sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program Pengembangan sistem irigasi di Desa Balinggi Kecamatan Balinggi, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program Pengembangan Sistem irigasi seperti dana dan sarana prasarana.
- c. Disposisi adalah sikap atau respon implementor terhadap kebijakan dalam pengembangan sistem irigasi di Desa Suli Indah Kecamatan Balinggi seperti : kesadran pelaksana, petunjuk atau arahan pelaksana untuk merespon program pengembangan sistem irigasi menuju kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut.
- d. Struktur Birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan Pengembangan sistem irigasi di Desa Suli Indah Kecamatan Balinggi. Aspek struktur birokrasi yang bertugas melakukan kebijakan dalam hal ini adalah KUPTD pertanian Kecamatan Balinggi dalam melakukan standar SOP yang menjadikan pedoman bagi KUPTD dalam bertindak.

Upaya-upaya UPTD Pertanian dalam melakukan struktur birokrasi yang tidak rumit serta berbelit-belit.

Sumber data yang di pergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data utama yang di dapat setelah wawancara dari beberapa informan utama dan data sekunder yaitu data yang berasal dari buku-buku dan sumber-sumber lain yang mendukung.

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari responden melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Data sekunder adalah data pendukung yang di peroleh dari UPTD pertanian Balinggi yang bersifat dokumen-dokumen, buku-buku maupun arsip-arsip yang relevan dengan penelitian.

Sumber data yang di pergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data utama yang di dapat setelah wawancara dari beberapa informan utama dan data sekunder yaitu data yang berasal dari buku-buku dan sumber-sumber lain yang mendukung.

Untuk memperoleh data yang di perlukan maka di gunakan tehnik pengumpulan data yang di sesuaikan dengan maksud dan tujuan penelitian. Tehnik pengumpulan data yang di gunakan adalah:

a. Observasi

Tehnik pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan di gunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia , proses kerja , gejala-gejala alam dan bila responden yang di amati tidak terlalu besar.

Menurut Sutrisno dan Sugiono (2006:166) menjelaskan bahwa:

“Observasi merupakan suatu proses yang kompleks , suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.”

Observasi yaitu pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan

penelitian penulis. Menurut Sanafiah Faisal (2001:51)

“Metode observasi adalah metode penyimpulan data yang menggunakan pengamatan dan penginderaan langsung terhadap suatu benda , kondisi, situasi, proses dan perilaku.”

b. Wawancara

Wawancara di maksudkan sebagai suatu metode yang di gunakan untuk memperoleh data-data yang bersifat lisan dari informan melalui tatap muka langsung.

Masni Singarimbun dan Sofyan Efendi (1982:145)menyatakan bahwa:

“Wawancara adalah salah satu bagian terpenting dari setiap survey, tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat di peroleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden , data seperti ini merupakan tulang punggung suatu penelitian.”

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini di gunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan focus penelitian dari berbagai sumber dokumen yang tersedia.

Arikunto (2002:135)

“dokumentasi yang berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis, merupakan tehnik pengumpulan data yang di lakukan dengan menelusuri berbagai sumber seperti buku-buku, majalah, notulen, rapat , catatan harian , dan lain-lain.”

Sesuai dengan prinsip metodologi penelitian ini, kedudukan peneliti adalah instrument peneliti utama yang berperan untuk memanfaatkan semua tehnik pengumpulan data yang dipilih untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan data.

Menurut Miles dan Huberman, (Emzir, 2010) terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini

berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

1. pengumpulan data berupa suatu pernyataan (statement) tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti : merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

3. Model Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk : uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya

4. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 9 Tahun 2008 telah membentuk Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong yang mempunyai fungsi sebagai perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, dan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas (UPTD). Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

a. Struktur Organisasi Organisasi merupakan suatu usaha atau kegiatan kelompok manusia dengan menggunakan alat atau fasilitas secara berencana, Sistematis dan terkordinir untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pertanian Dan Peternakan Kecamatan Balinggi dilengkapi dengan struktur organisasi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD meliputi:

1. Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian; dan
2. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang berkordinasi dengan Dinas Pertanian

b. Tata kerja Setelah di uraikan struktur organisasi secara keseluruhan, maka berikut ini akan di paparkan tugas kelembagaan dari segi oprasional kerja berdasarkan Rencana Strategis memberikan arah penyelenggaraan pembangunan pertanian dan peternakan dalam jangka waktu lima tahun dalam rangka mewujudkan pertanian tangguh, modern dan berwawasan lingkungan.

Visi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong, Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong menetapkan enam rumus misi, yaitu :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, bersih dan berwibawa baik aparat maupun pelaku agribisnis.
2. Memperkokoh sistem ketahanan pangan masyarakat melalui upaya penerapan panca yasa pembangunan pertanian yang modern dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan.
3. Mendorong terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura

dan peternakan untuk kesejahteraan petani.

4. Menumbuhkembangkan kelembagaan pertanian yang kuat, tangguh dan profesional
5. Meningkatkan dan mengembangkan komoditas unggulan yang lebih inovatif dan produktif dalam upaya peningkatan dan mengoptimalkan sumber – sumber pendapatan asli daerah.
6. Mendorong pembangunan dan pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan peternakan menuju pertanian yang tangguh, berdaya saing berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Tata usaha memiliki tugas pokok membantu Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas dalam rangka menyusun program dan tugas pelayanan administrasi secara terpadu dan terkordinasi dengan sub seksi sesuai dengan lingkup tugas satuan organisasi di lingkungan cabang dinas.

Penyuluh pertanian lapangan atau yang paling sering di sebut PPL mempunyai tugas pokok penyampaian mengenai teknologi, informasi kepada kelompok-kelompok tani tentang pertanian dan membantu para petani untuk mendapatkan kebutuhan semua hal dalam pertanian, seperti penggunaan pupuk, penggunaan pestisida, serta cara-cara lain dalam pertanian di mana untuk meningkatkan kualitas pertanian

Pegawai merupakan bagian yang sangat penting di dalam suatu organisasi, betapapun kecilnya organisasi itu. Untuk melaksanakan kegiatan dalam suatu organisasi di perlukan tenaga kerja atau pegawai dalam jumlah tertentu dengan memiliki kemampuan kerja yang memadai sehingga dapat melakukan tugas dengan pekerjaan sebaik mungkin, sesuai yang di inginkan.

Pelaksana Tehnis dinas Pertanian Dan Peternakan Kecamatan Balinggi saat ini berjumlah 2 orang, Namun dalam upaya pelaksanaan program pemerintah Unit

Pelaksana Tehnis Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Balinggi di bantu oleh Badan Penyuluh Pertanian. Keadaan pegawai Menurut Jenis Kelamin dan jabatan pada Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pertanian Dan Peternakan Kecamatan Balinggi hanya di dominasi oleh laki-laki di mana jumlah laki-laki 9 Orang sedangkan perempuan (0) tidak ada. Dilihat dari pangkat dan golongan, keadaan pegawai pada Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pertanian Dan Peternakan Kecamatan Balinggi golongan III berjumlah 1 orang Golongan II 4 orang dan yang honorer berjumlah 3 orang.

Dalam upaya menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas dan aktifitas sehari-hari, setiap organisasi harus memiliki sarana dan prasarana menunjang yang memadai selain sumber daya manusia (pegawai) sebagai penentu utama. sarana dan prasarana pada Unit pelaksana Tehnis Dinas Pertanian Dan Peternakan Kecamatan Balinggi meja kerja 11 buah, kursi kerja 11 buah, komputer 1 unit, meja rapat 1 buah, kipas angin 2 buah, kendaraan roda dua 2 unit, sound sistem 1 unit.

Implementasi kebijakan Pengembangan sistem irigasi adalah salah satu dari upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu hasil pertanian di Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa kebijakan pengembangan sistem irigasi seharusnya dapat menjadi salah satu pokok utama dalam menyuplai air yang mengairi persawahan yang dapat mewujudkan hasil pertanian yang produktif. Dengan demikian tidak ada alasan bagi petani untuk mencoba mengalihkan lahan persawahannya menjadi lahan perkebunan.

Tentu saja hal ini juga di tegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air dan dalam Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2006 tentang irigasi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 30/PRT/M/2007, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.

Sebagai konsekuensi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, maka terjadi beberapa perubahan wewenang dan tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi, yang secara substansial sebenarnya sudah lama dikenal melalui pola swadaya atau gotong royong.

Implementasi kebijakan ini dapat berhasil apabila di tunjang oleh berbagai aspek, seperti adanya komunikasi program untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang tujuan dan sasaran kebijakan yang akan dilaksanakan, tersedianya sumber daya yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan, kemudian unsure pimpinan yang mampu memberikan disposisi sesuai dengan prosedur yang ada, serta memperhatikan struktur birokrasi yang telah ditentukan.

1. Komunikasi

Dimensi komunikasi menunjukkan peranan sebagai acuan pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang mereka kerjakan. Informasi kebijakan publik perlu di sampaikan kepada pelaku agar para pelaku kebijakan dapat mengerti, memahami apa yang menjadi isi, tujuan arah, kelompok sasaran (*target groups*) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus di persiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang ada menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat di capai sesuai dengan yang kita harapkan.

Komunikasi dalam suatu organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskan.

Untuk mengetahui lebih jelas peran penting komunikasi yang di lakukan oleh pihak unit pelaksana tehnis dinas pertanian dan peternakan mengenai kebijakan pengembangan sistem jaringan irigasi di desa suli indah kecamatan balinggi kabupaten

parigi mautong. Berikut hasil observasi dan wawancara peneliti Pada tanggal 17 November 2015 Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala unit pelaksana teknis dinas pertanian dan peternakan kecamatan Balinggi mengenai pentingnya komunikasi dalam implementasi kebijakan pengembangan sistem jaringan irigasi, yang bernama Supriadin Sp menurutnya:

“saya sebagai kepala UPTD pertanian dan peternakan selalu mengkomunikasikan implementasi bantuan-bantuan pertanian dan peternakan kepada petani maupun kepada PPL (penyuluh pertanian lapangan) dengan mengadakan rapat ataupun melalui pemberitahuan. Mengenai transparansi keuangan kami cukup mengawasi dan mengajarkan kepada petani mengenai pengelolaan dana dalam pembuatan maupun merenofasi sistem jaringan irigasi sehingga kami mengetahui dengan jelas dana tersebut di gunakan sepenuhnya untuk kepentingan pembuatan jaringan irigasi, di karenakan sepenuhnya masalah keuangan di serahkan kepada kelompok tani yang menerima bantuan.”

Apa yang telah peneliti dapat dari hasil wawancara di atas di dukung oleh hasil obserfasi yang telah peneliti lakukan selama masa penelitian dimana komunikasi yang terjalin antara pembuat kebijakan dan penerima kebijakn belum maksimal, dimana kepala unit dinas pertanian dan peternakan tidak terlalu intens dalam membina petani agar lebih memahami bagaimana kebijakan sistem jaringan irgasi ini berjalan dengan baik. Hal ini di perkuat dengan banyaknya petani tidak mengenal, penyuluh pertaniannya, serta fungsi dan tugasnya dalam membina petani agar bisa memahami petunjuk teknis yang telah di atur bisa terlaksana dengan semestinya.

2. Sumber Daya

Dimensi sumber daya tidak hanya mencakup jumlah sumber daya manusia atau aparat semata, melainkan juga

mencakup kemampuan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini dapat menjelaskan bahwa sumberdaya yang memadai dan memahami kualifikasi akan menghasilkan pelaksanaan kebijakan yang tepat dan efektif.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat di laksanakan program secara sempurna karena mereka tidak dapat melakukan pengawasan dengan baik. jika jumlah staf pelaksana kebijakan maka hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan kemampuan atau skill para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen sumberdaya manusia yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Berikut hasil observasi dan wawancara peneliti dengan penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan peternakan kecamatan Balinggi Pada tanggal-26-November 2015 bapak I Wayan Winarya SP mengatakan :

“Sumberdaya yang di miliki unit pelaksana teknis dinas pertanian dan peternakan kecamatan balinggi sangat baik sehingga dalam upaya pengembangan sistem jaringan irigasi dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan sesuai dengan peruntukannya”.

Hal di atas berbanding terbalik dengan hasil pengamatan peneliti dimana peneliti mendapatkan beberapa kelompok tani yang bila di Tanya mengenai laporan keuangan mereka masih bingung dan sumberdaya manusia yang ada di dinas pertanian belum betul-betul terpenuhi dimana status pegawai Penyuluh pertanian lapangan yang masih Honorer, yang menghambat kinerja penyuluh tersebut malas untuk melakukan tugasnya dengan maksimal.

3. Disposisi

Dimensi disposisi atau sikap pelaksana yang di artikan sebagai keinginan atau kesepakatan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan di laksanakan secara efektif, pelaksana bukan hanya harus mengetahui apa

yang mereka kerjakan, tetapi mereka juga harus memiliki kemampuan untuk menerapkannya, serta mereka juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Ada tiga bentuk sikap atau respon implementor terhadap kebijakan, yaitu kesadaran pelaksana, petunjuk atau arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program, namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya, sehingga secara sembunyi-sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Untuk lebih jelasnya peneliti melakukan pengamatan langsung dan wawan cara pada petani ibu Anagung Sugiyasah Mengatatakan :

“menurut saya unit pelaksana teknis dinas pertanian dan peternakan kecamatan balinggi sudah benar-benar selalu berkordinasi dengan kami selaku petani, dimana kami selalu bersama-sama hadir dalam rapat-rapat pengurus irigasi, sehingga dalam pengembangan sistem jaringan irigasi kami selalu di ingatkan serta di ajarkan bagaimana cara yang baik dan benar dalam mengelola menggunakan dana bantuan tersebut dalam membuat jaringan irigasi sesuai dengan rencana anggaran pembangunan dan tanpa menyalahgunakan tersebut, sehingga dana tersebut benar digunakan sebagaimana adanya.”

Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan di perkuat oleh obserfasi peneliti di lapangan yang menunjukkan bahwa disposisi yang ada di dinas pertanian dan peternakan kecamatan balinggi belum berjalan dengan maksimal, dimana petani yang ada di desa suli indah belum mengetahui dengan jelas petunjuk teknis yang ada hal ini menurut peneliti terjadi di karenakan kepala unit dinas pertanian dan peternakan kecamatan balinggi belum betul-

betul mengimplementasikan petunjuk teknis yang ada sehingga masalah yang muncul di lapangan adalah penyalahgunaan keuanagan dalam pengelolaan dana bantuan pengembangan sistem jaringan iriggasi hal ini diawali oleh ketidak pahaman petani terkait pengelolaan dana tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, serta hubungan organisasi dengan organisasi luar, dan sebagainya.

Pengawasan sangat di perlukan untuk tetap membantu pengimplementasian kebijakan yang di lakukan oleh instansi penerima kebijakan. salah satu langkah yang perlu di lakukan adalah dengan membuat peraturan yang jelas tentang pelaksanaan kebijakan, dalam hal ini kebijakan bantuan pengembangan sistem jaringan irigasi. Untuk lebih jelas mengenai struktur birokrasi di unit pelaksana teknis dinas pertanian dan peternakan kecamatan balinggi peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada Ketua GP3A yang ada di desa suli indah yang di wawancarai pada tanggal 09-Januari-2016 bapak I Made Lostir mengatakan bahwa:

“menurut saya strukrur birokrasi yang berjalan sudah sesuai dengan petunjuk teknis dari dinas pertanian, dimana saya selalu mengawasi proses berjalannya kebijakan pengembangan sitem jaringan irigasi ini dari awal sampai selesai dimana di mulai dari pengajuan atau permohonan dari kelompok-kelompok tani yang ada di desa suli indah yang berbentuk proposal yang kemudian di tindak lanjuti oleh unit pelaksana teknis dinas pertanian dan peternakan kecamatan balinggi dengan turun kelapangan melihat kondisi yang ada, lalu menyeleksi sesuai dengan tingkat kerusakan jaringan irigasi yang ada, kemudian mengajukannya ke dinas

pertanian kabupaten. Bahkan yang saya tahu kepala unit pelaksana teknis dinas pertanian dan peternakan kecamatan balinggi selalu mengawal proposal pengajuan kami sampai di setujui. Dan sampai dananya turun, selalu mengawasi kelompok-kelompok yang mendapatkan dana sampai pemeriksaan turun memeriksa kami.”

Menurut peneliti dampak merupakan akibat dan sangat erat kaitannya dengan implementasi dari suatu kebijakan. Jika kebijakan di implementasikan secara tidak maksimal atau dalam implementasinya terjadi penyimpangan, maka tentu saja dampaknya tidak akan maksimal atau dampaknya hanya di rasakan oleh segelintir orang saja. Namun jika implementasi di lakukan sesuai dengan naturan yang berlaku dan tetap berjalan pada jalurnya maka dampak yang di timbulkan maka akan sesuai dengan harapan dari pembuat kebijakan. Implementasi akan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang di lakukan dapat di simpulkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan sistem jaringan irigasi di Desa Suli Indah Kecamatan Balinggi Kabupaten parigi mautong yang di lihat oleh beberapa faktor belum berjalan sebagaimana mestinya. Di lihat dari faktor komunikasi belum maksimal sehingga masih perlu di tingkatkan karena komunikasi yang terjalin belum terjalin dengan cukup baik antara kepala unit pelaksana teknis dinas pertanian dan peternakan dengan penyuluh pertanian lapangan dalam jangkauan petani-petani yang ada di desa suli indah.

Aspek berikutnya adalah sumber daya, sumberdaya yang dimiliki oleh unit pelaksana teknis dinas pertanian dan peternakan kecamatan balinggi kabupaten parigi mautong belum cukupbaik karna masih bnyak yang hanya pegawai honorer.,

namun sumberdaya manusia yang mengelola keuangan dan bertanggung jawab langsung terhadap penggunaannya yaitu para petani atau pengurus kelompok masih perlu di kawal dan di bina.

Kemudian aspek disposisi dari pimpinan, dalam hal ini kepala unit pelaksana teknis dinas pertanian dan peternakan kecamatan balinggi kabupaten parigi mautong belum maksimal dimana UPTD belum mengimplementasikan petunjuk teknis dengan sepenuhnya di lihat masi adanya penyalahgunaan dana oleh kelompok tani yang di awali oleh ketidak pahaman mereka terkait pengelolaan dana tersebut.

Selanjutnya aspek terakhir yaitu struktur birokrasi di unit pelaksana teknis dinas pertanian dan peternakan kecamatan balinggi kabupaten parigi mautong sudah di tentukan dengan jelas dan tertera dengan baik, namun yang terjadi di lapangan tidak seperti harapan dimana kendala terbesar keterbatasan dalam mengimplementasikan petunjuk teknis kepada petani akar mengerjakan dan mengelolala keuangan seperti yang sudah di ajarkan dan di tentukan. sehingga semua elemen yang terkait mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing.

Rekomendasi

Upaya yang dapat di lakukan dalam rangka mendorong lebih maksimalnya implementasi kebijakan bantuan pengembangan sistem jaringan irigasi di desa suli indah kecamatan balinggi kabupaten parigi mautong dengan meningkatkan komunikasi:

Kepala unit pelaksana teknis dinas pertanian dan peternakan harus lebih memotifasi petani-petani dan pengurus kelompok sehingga dana yang di kelolah untuk pengembangan sistem jaringan irigasi bisa di gunakan secara optimal.

Kepala unit pelaksana teknis dinas pertanian dan peternakan dan penyuluh

pertanian lapangan harus lebih memahami petunjuk teknis lagi agar mencegah penyalahgunaan dana pengembangan sistem jaringan irigasi, serta harus terus mendampingi petani dalam mengawasi penggunaan dana tersebut.

Perlu adanya diklat atau pendidikan dasar buat petani atau pengurus kelompok mengenai petunjuk teknis dalam pengelolaan uang serta pembuatan laporannya

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Dr. Hasbullah, M.Si. selaku ketua tim pembimbing dan Dr. H. Sastrio Mansyur, M.Si. selaku anggota tim pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan motifasi selama penulisan hingga selesainya penyusunan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi V*. Jakarta: Rhineka Cipta
- B. Mathew, Miles Dan Huberman, Michael A. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Faisal, Sanafia. (2011). *Statistik dan Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press
- Moleong, Lexy. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosada Karya
- Peraturan Daerah Parigi Moutong No.3 tahun 2009. Tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
- PP no.20 tahun 2006. *tentang irigasi*
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES,
- Sugiono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta Bandung.
- Widodo, Joko. (2006). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: Bayu Media